

GOOD GOVERNANCE GUNA MENCEGAH
TSUNAMI SOSIAL

Refleksi 2006 dan Perspektif 2007

Oleh:

Sofian Effendi

Universitas Gadjah Mada

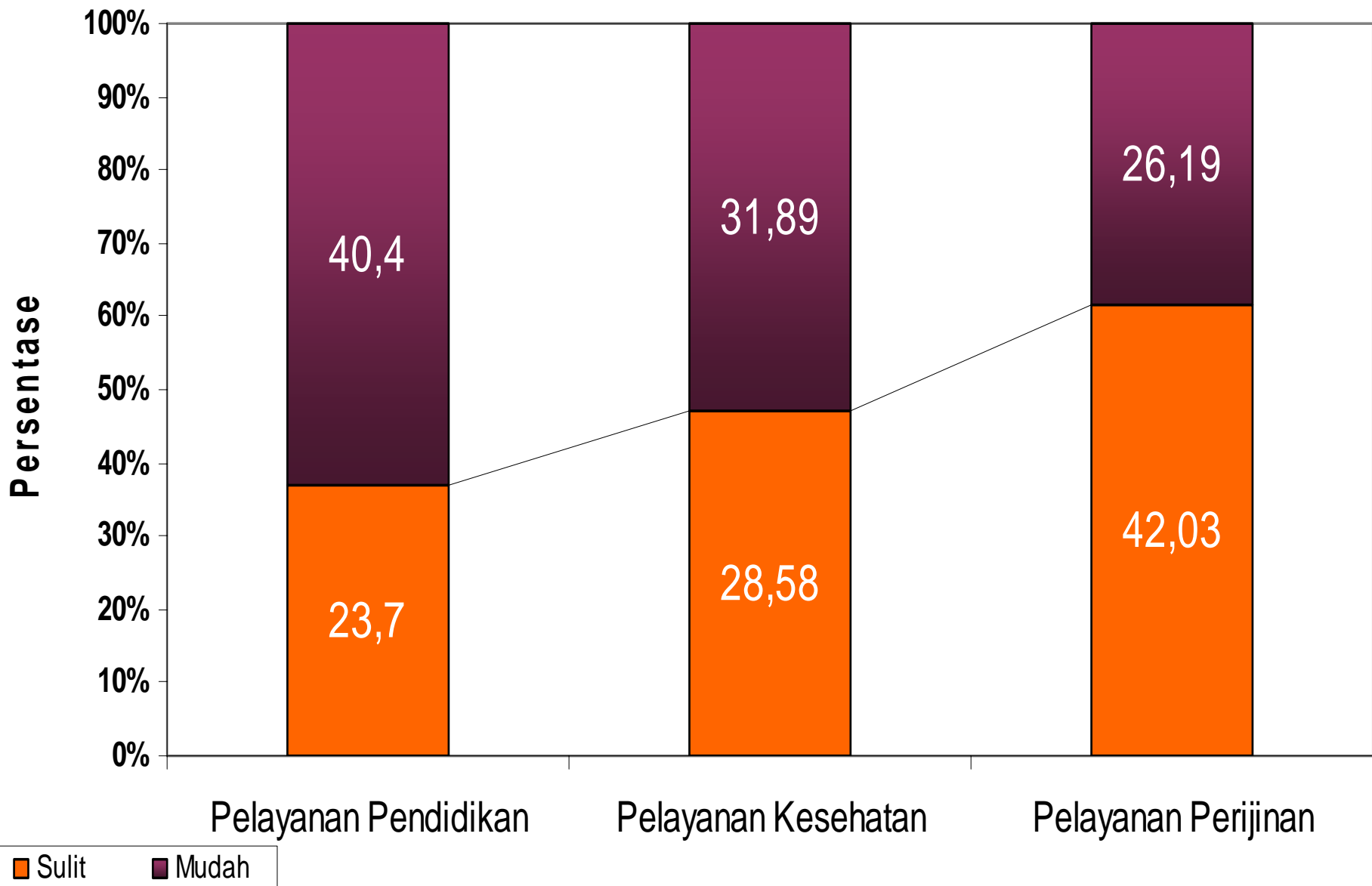
Stabilitas Ekonomi

- Mampukan Pemerintah KIB ciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan selenggarakan pemerintahan

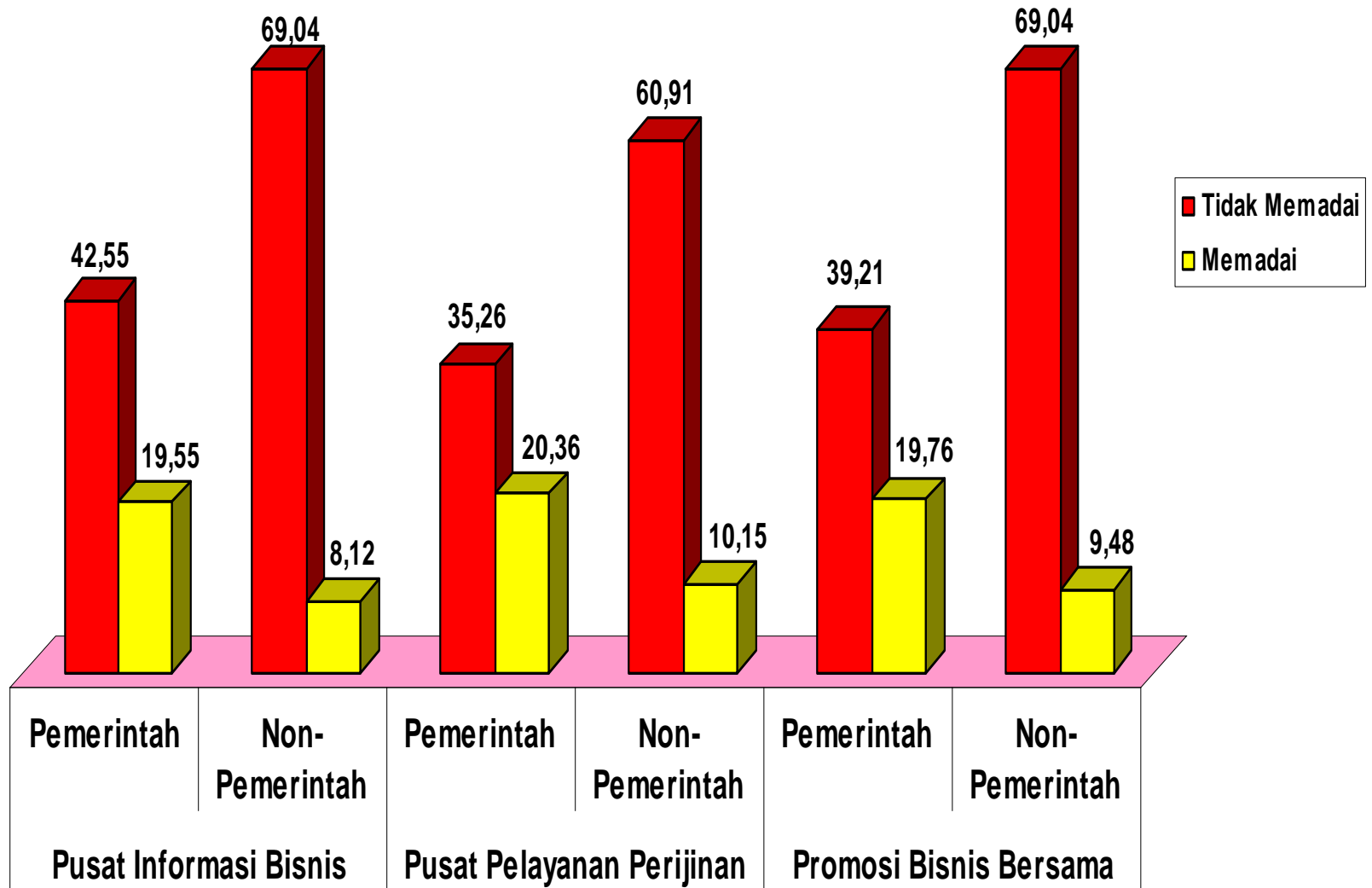
Aspek Tata Pemerintahan yang dinilai

- Kemampuan untuk memenuhi hak-hak politik;
- Kemampuan membuat regulasi yang sehat
- Kemampuan mengelola konflik dan mencegah kekerasan;
- Kemampuan menciptakan kepastian hukum;
- Kemampuan memberantas korupsi;
- Kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik.

TINGKAT KEMUDAHAN PROSEDUR PELAYANAN

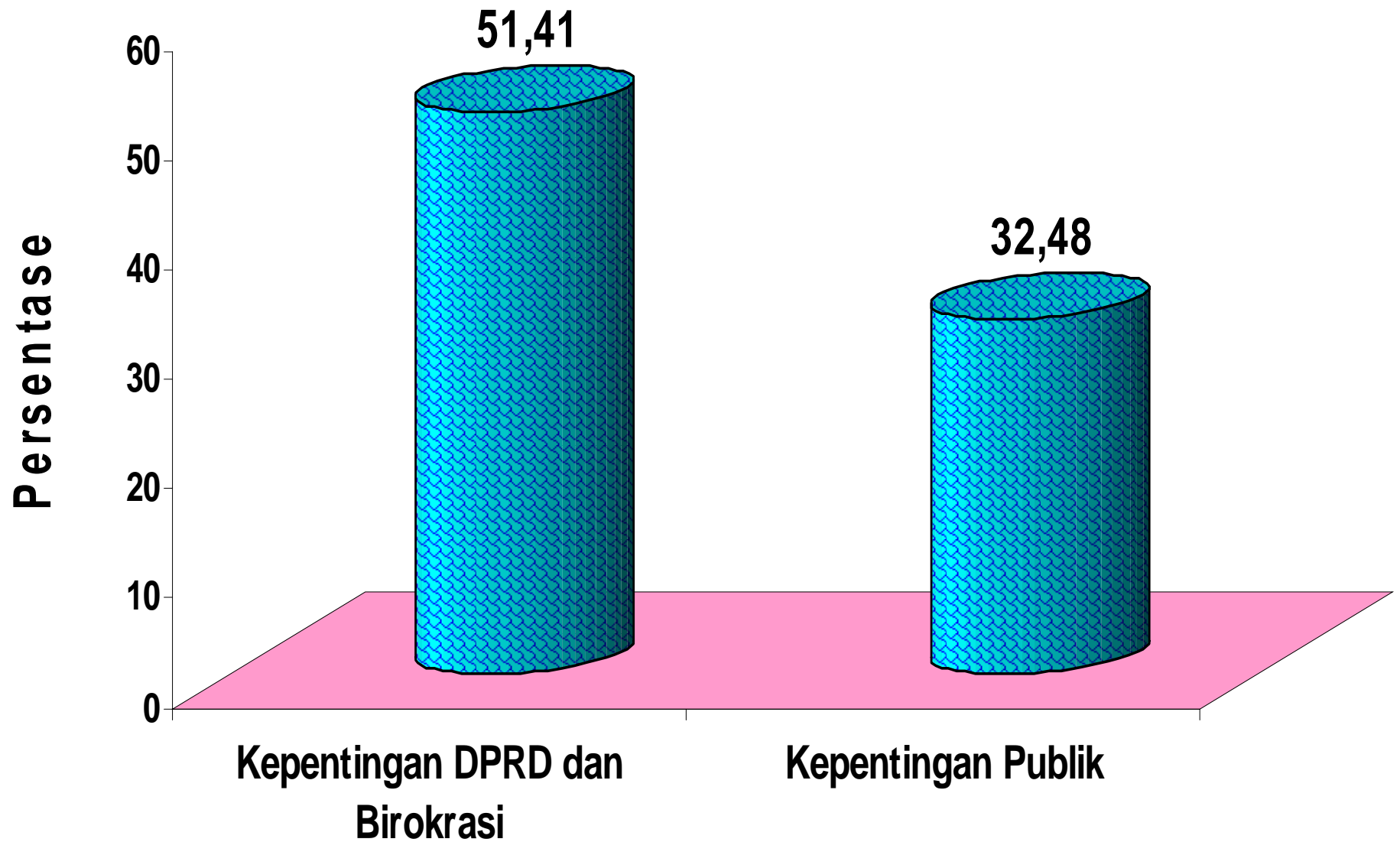


PENILAIAN TERHADAP BERBAGAI FASILITAS YANG DISEDIAKAN PEMDA UNTUK MENDORONG INVESTASI

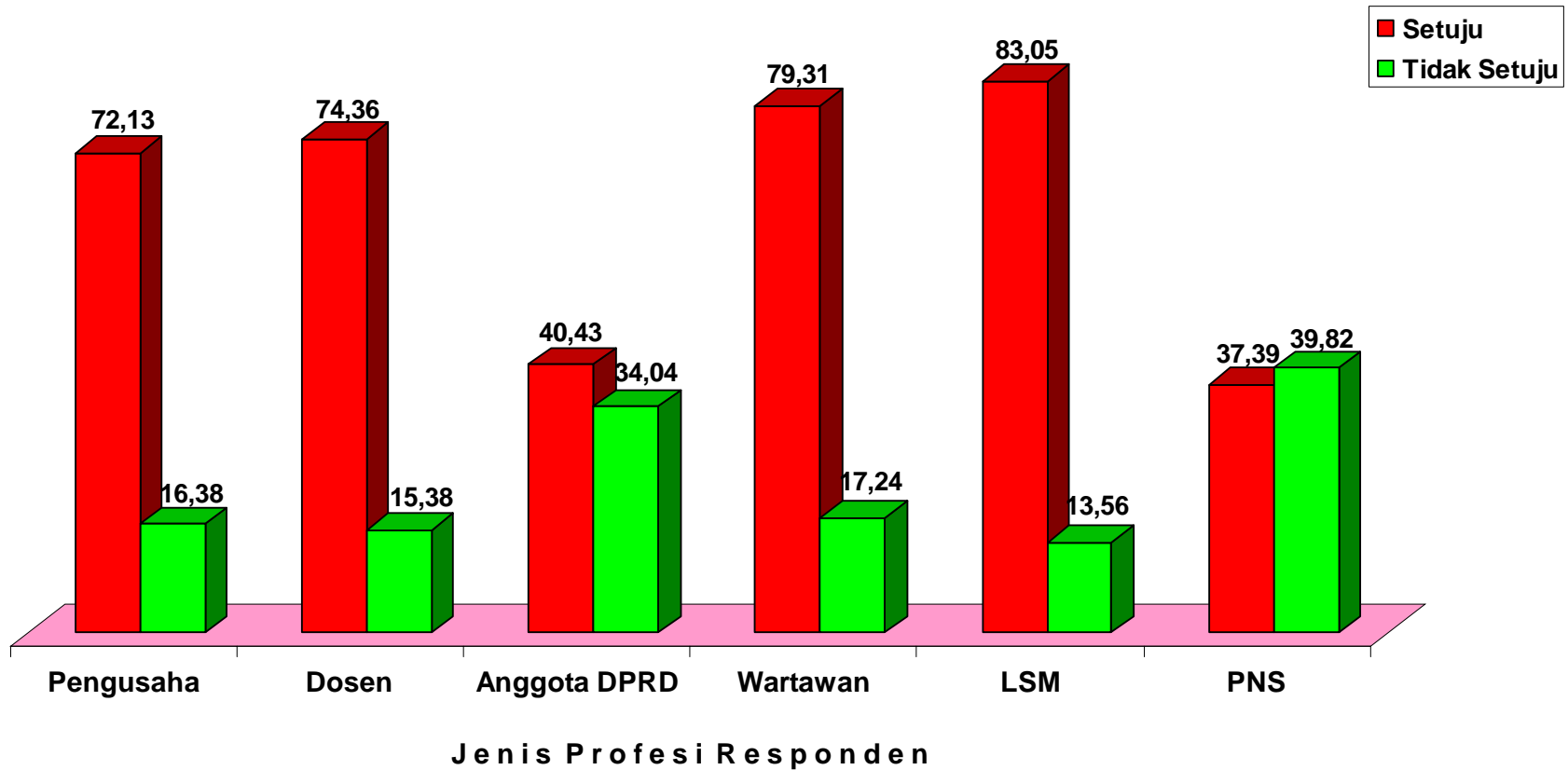


Anggaran dan kepentingan publik

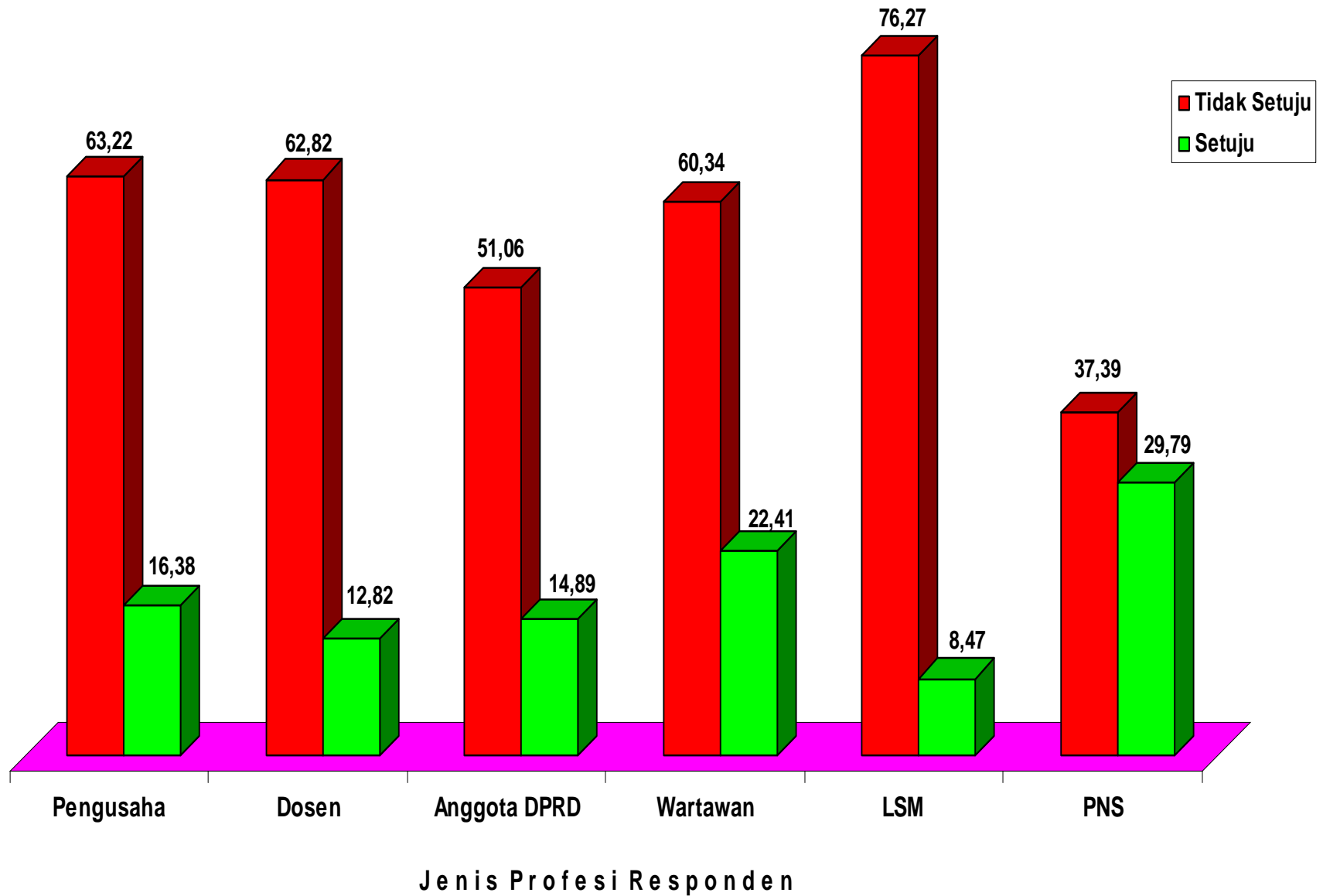
ORIENTASI KEPENTINGAN DALAM APBD



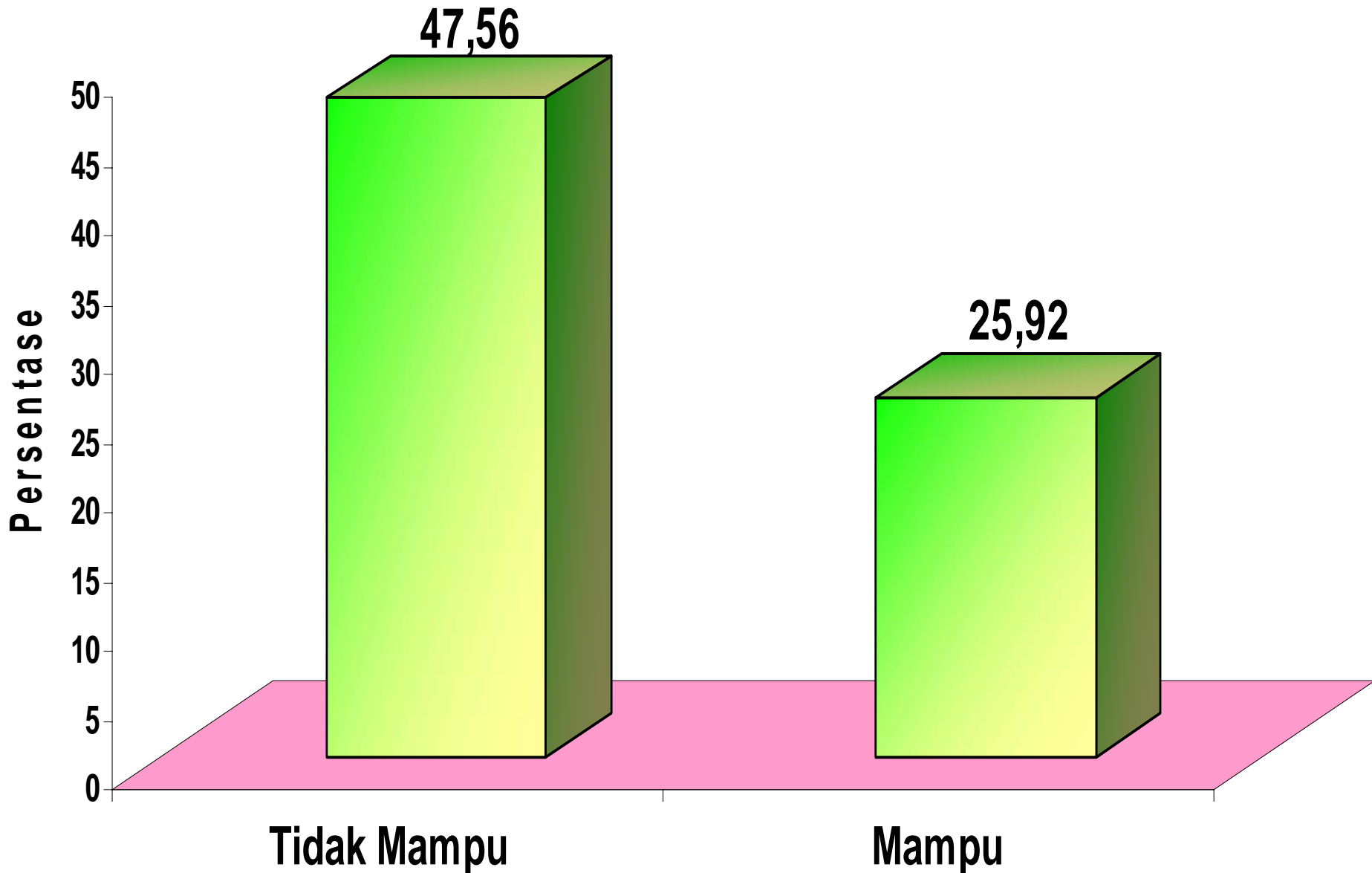
APBD Lebih Banyak Memenuhi Kepentingan Birokrasi dan DPRD daripada Kepentingan Publik ?



APBD Mampu Mengatasi Masalah Publik di Daerah ?



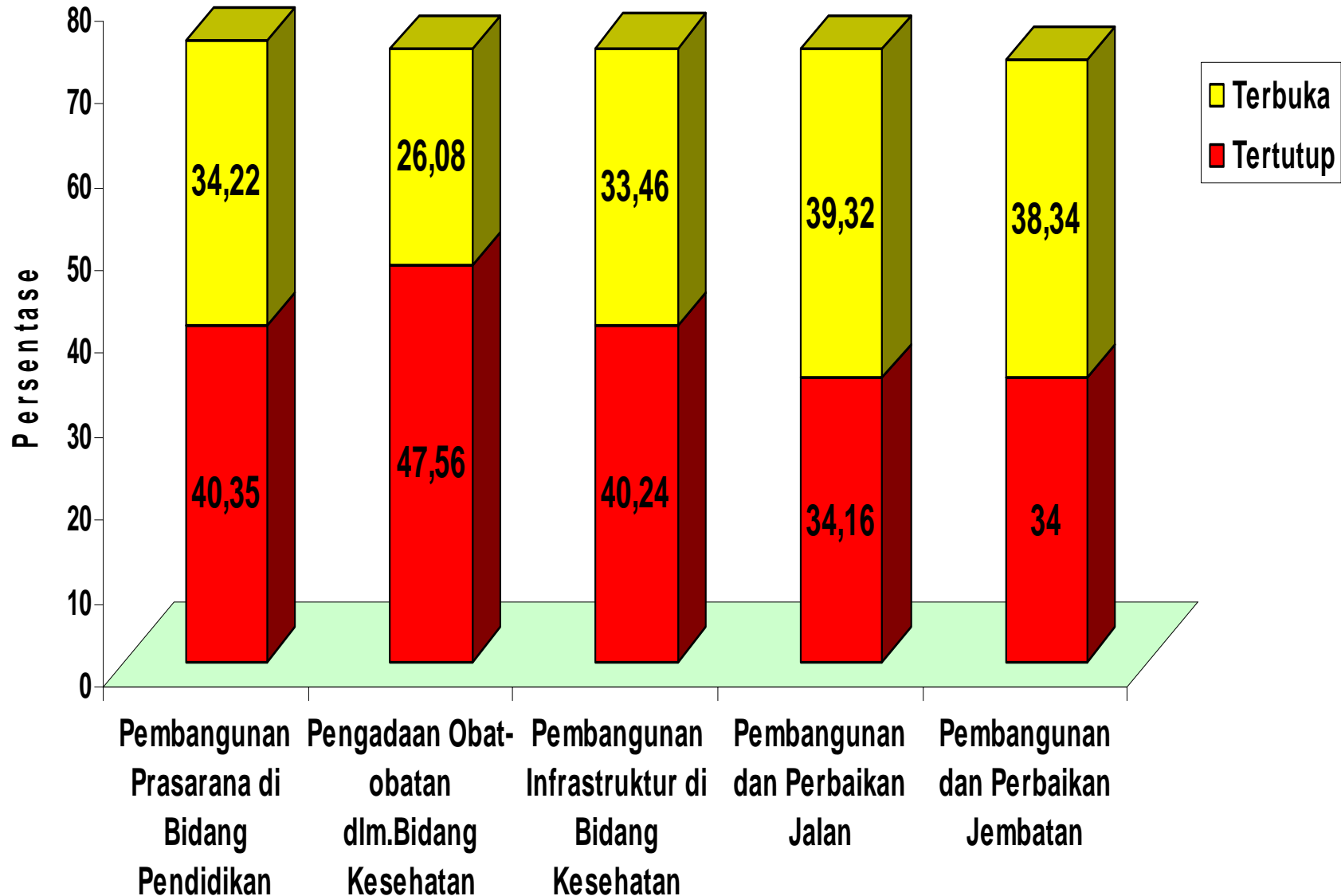
Kemampuan APBD Mengatasi Masalah Publik di Daerah



Kemampuan memenuhi hak-hak politik:

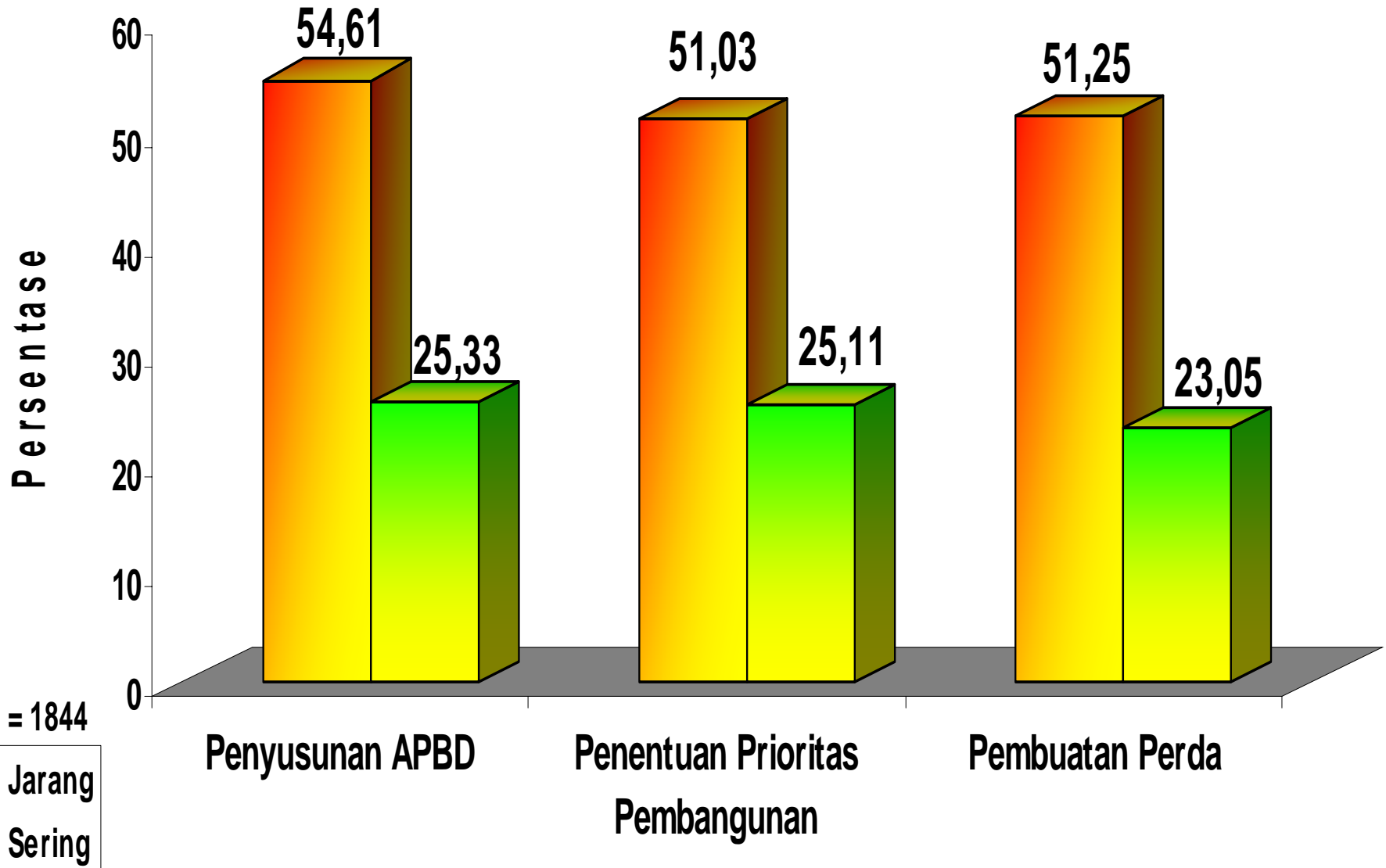
**Transparansi, partisipasi,
dan kapasitas
penyampaian aspirasi**

TRANSPARANSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN TENDER PROYEK



N = 1844

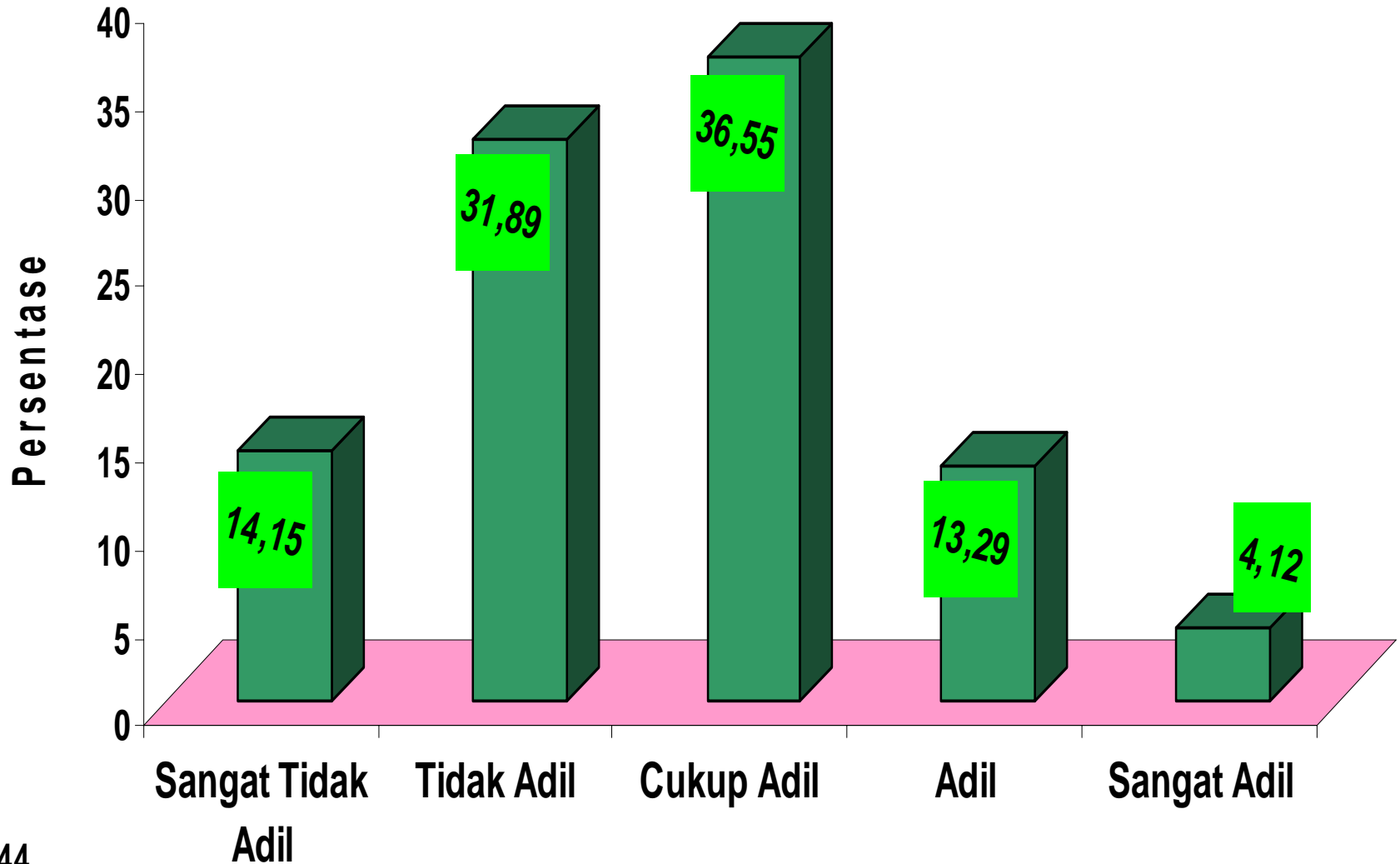
INTENSITAS PEMDA MENGUNDANG UNSUR NON-PEMERINTAH DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PEMERINTAH



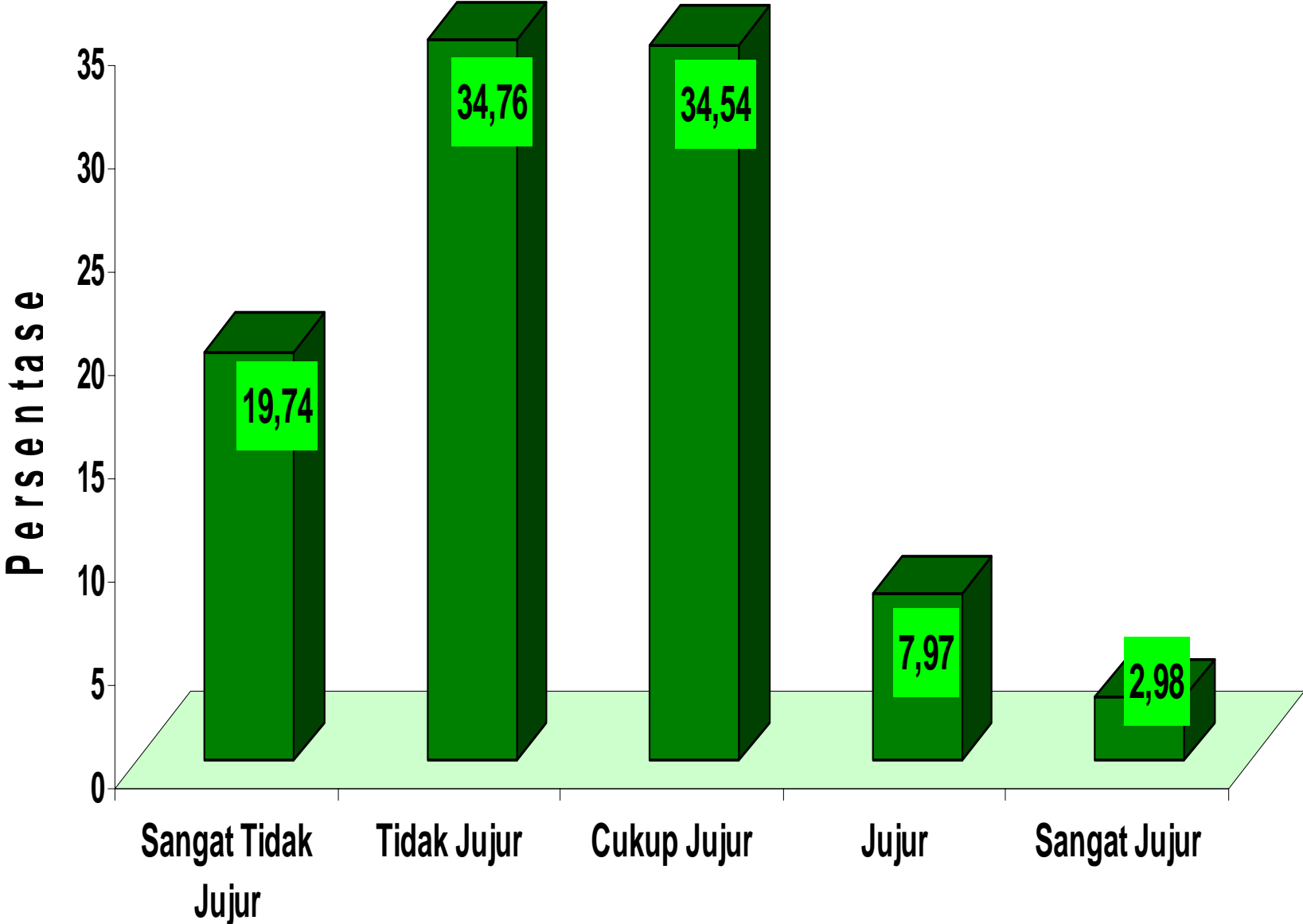
Kemampuan menegakan hukum

Keseriusan, keadilan, dan kejujuran dalam penegakan hukum dan akses terhadap perlindungan hukum

TINGKAT KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN/KOTA/PROPINSI

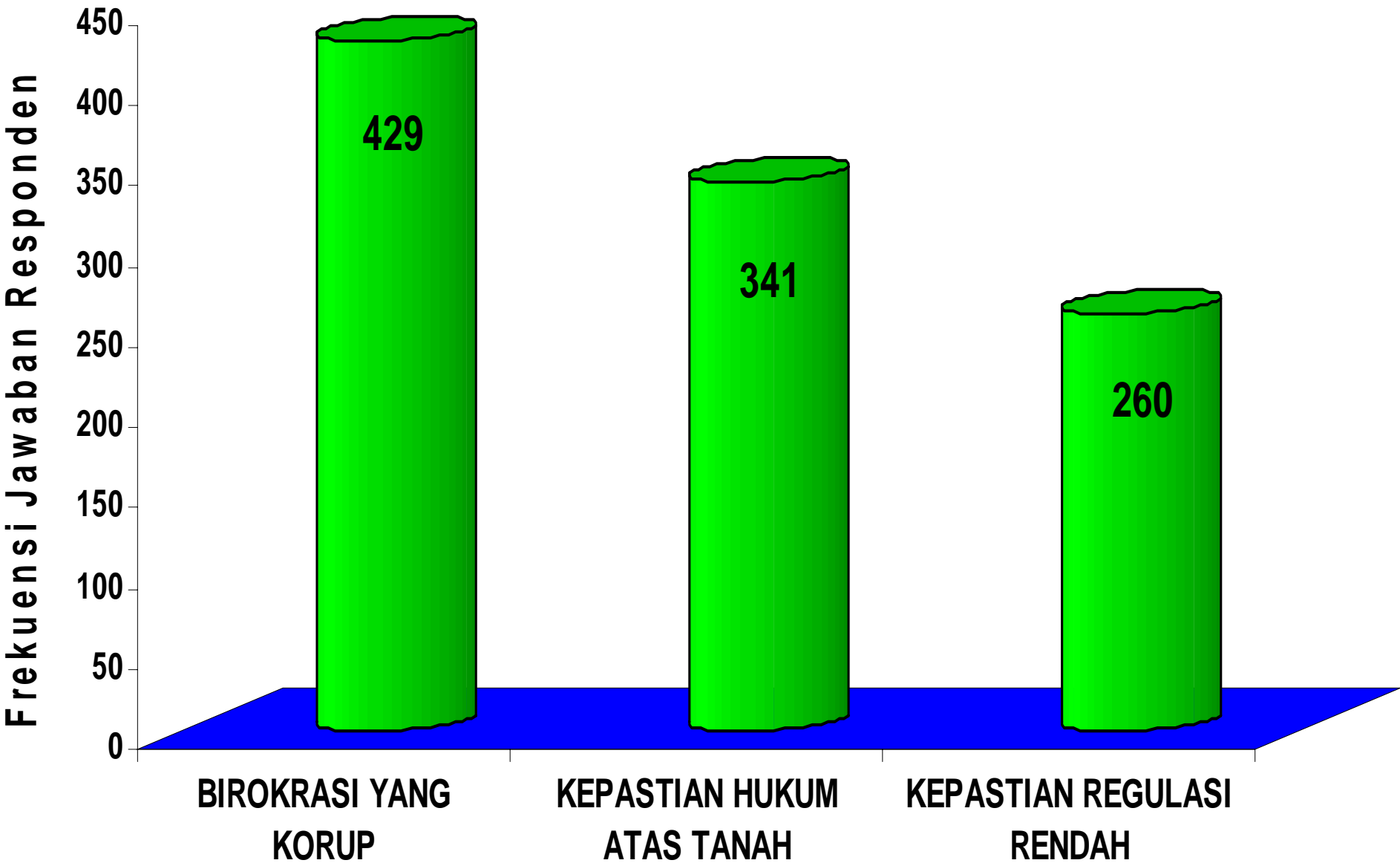


TINGKAT KEJUJURAN PROSES PERADILAN DI DAERAH PADA UMUMNYA



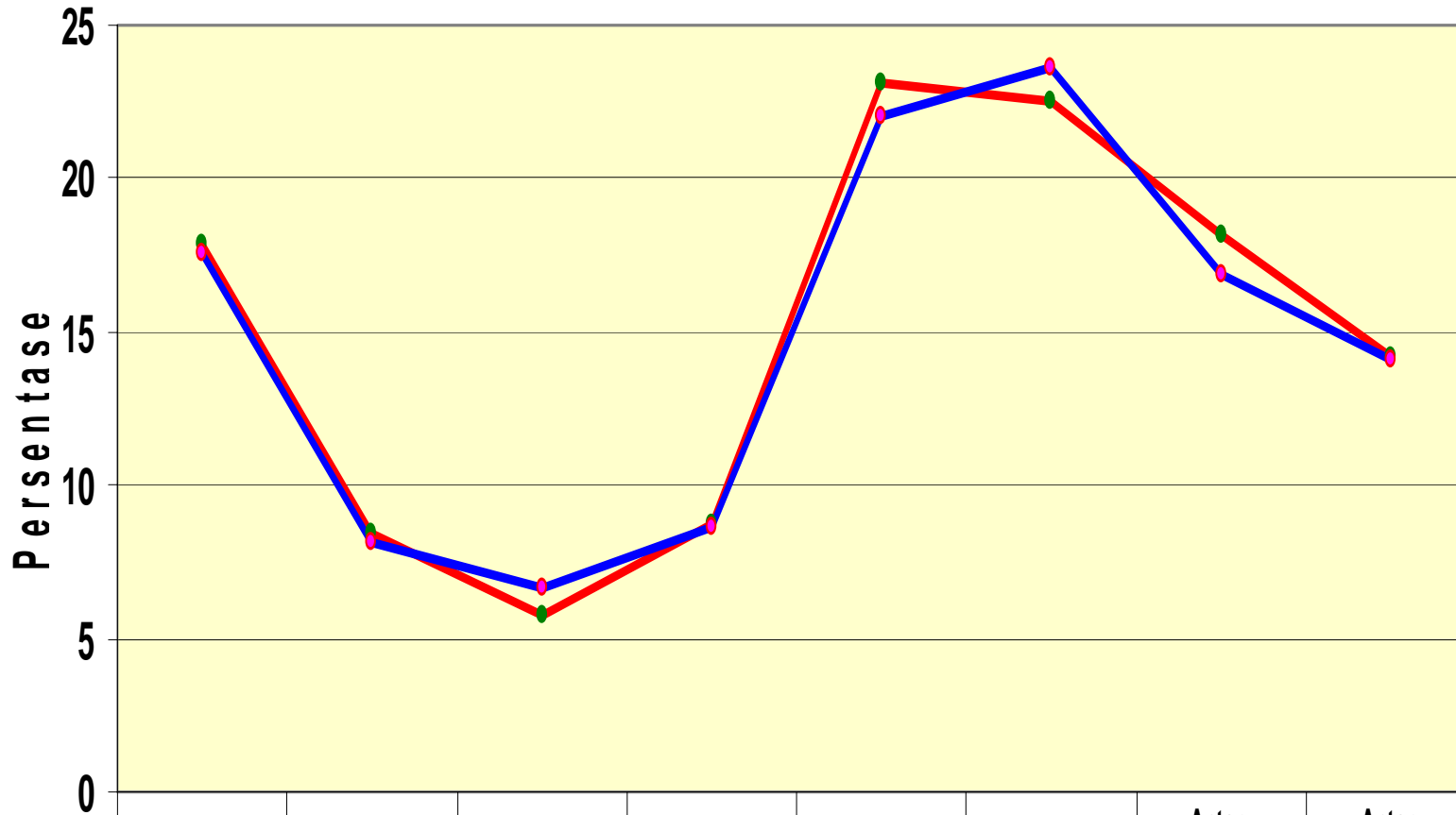
Kualitas Peraturan dan iklim usaha di daerah

FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN USAHA DI DAERAH



Stabilitas politik dan kapasitas mengelola konflik

FREKUENSI KONFLIK DAN PEMBERITAAN KONFLIK DI DAERAH



N = 1844

Frekuensi Konflik

Frekuensi Pemberitaan Konflik

Buruh -
Perusahaan

Antar-etnis

Antar-agama

Pendatang -
Penduduk Asli

Rakyat -
Pejabat

Eksekutif -
Legislatif

Antar-
pendukung
partai

Antar-
kelompok
masyarakat

17,89

8,46

5,8

8,73

23,1

22,51

18,11

14,15

17,57

8,13

6,67

8,67

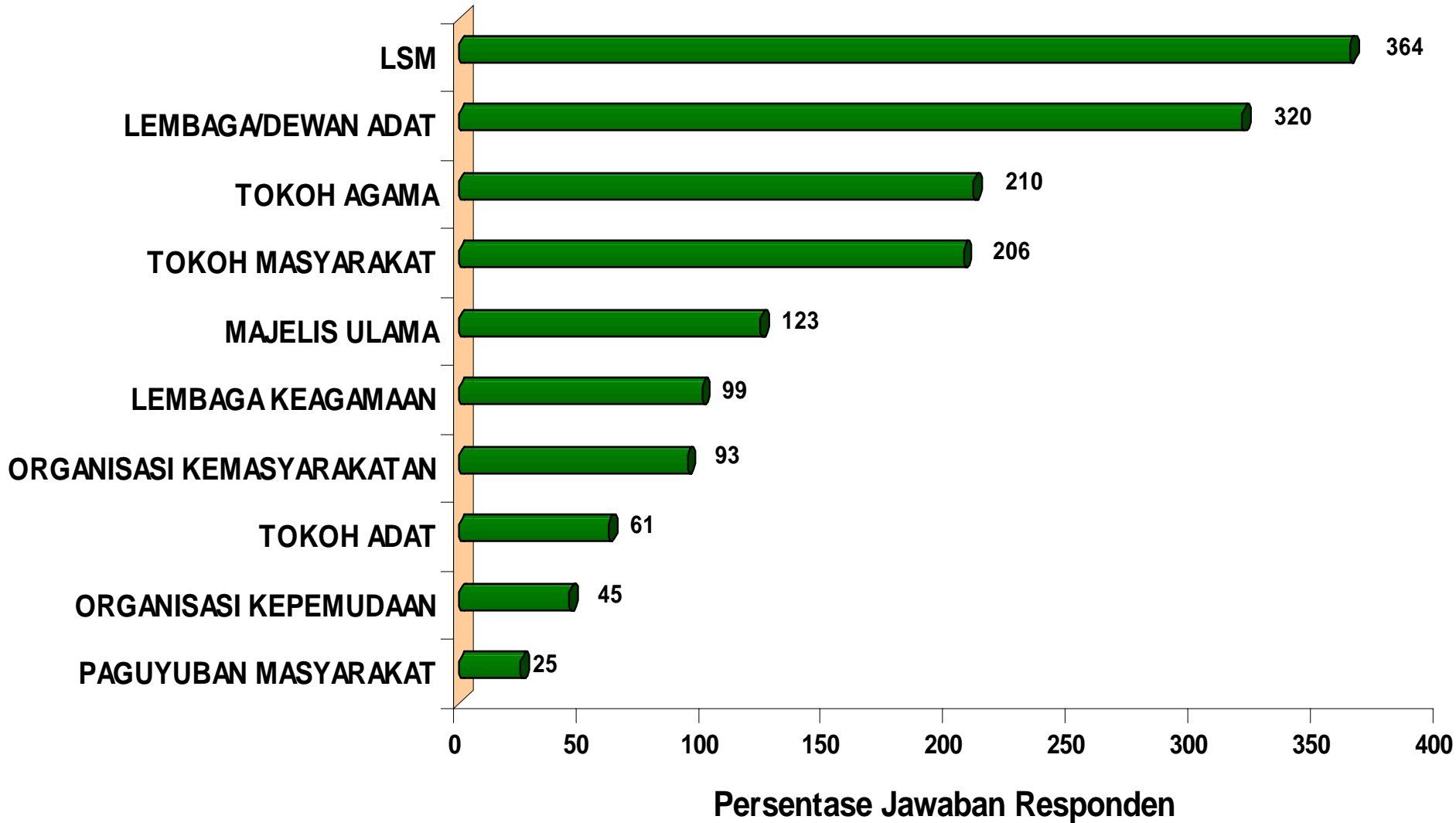
22,07

23,59

16,87

14,05

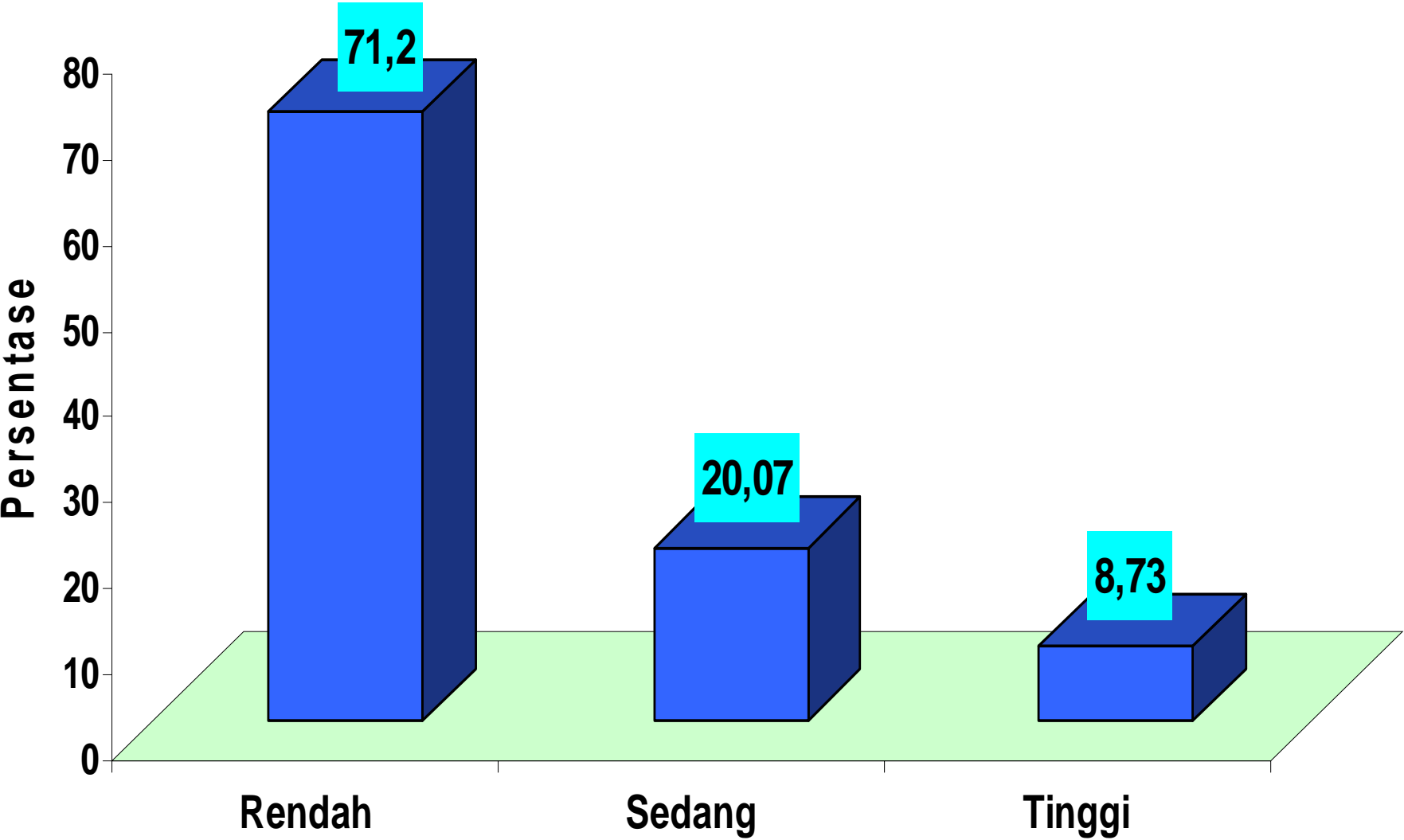
LEMBAGA- LEMBAGA NON-PEMERINTAH YANG BERPERAN MENYELESAIKAN KONFLIK SECARA DIALOGIS



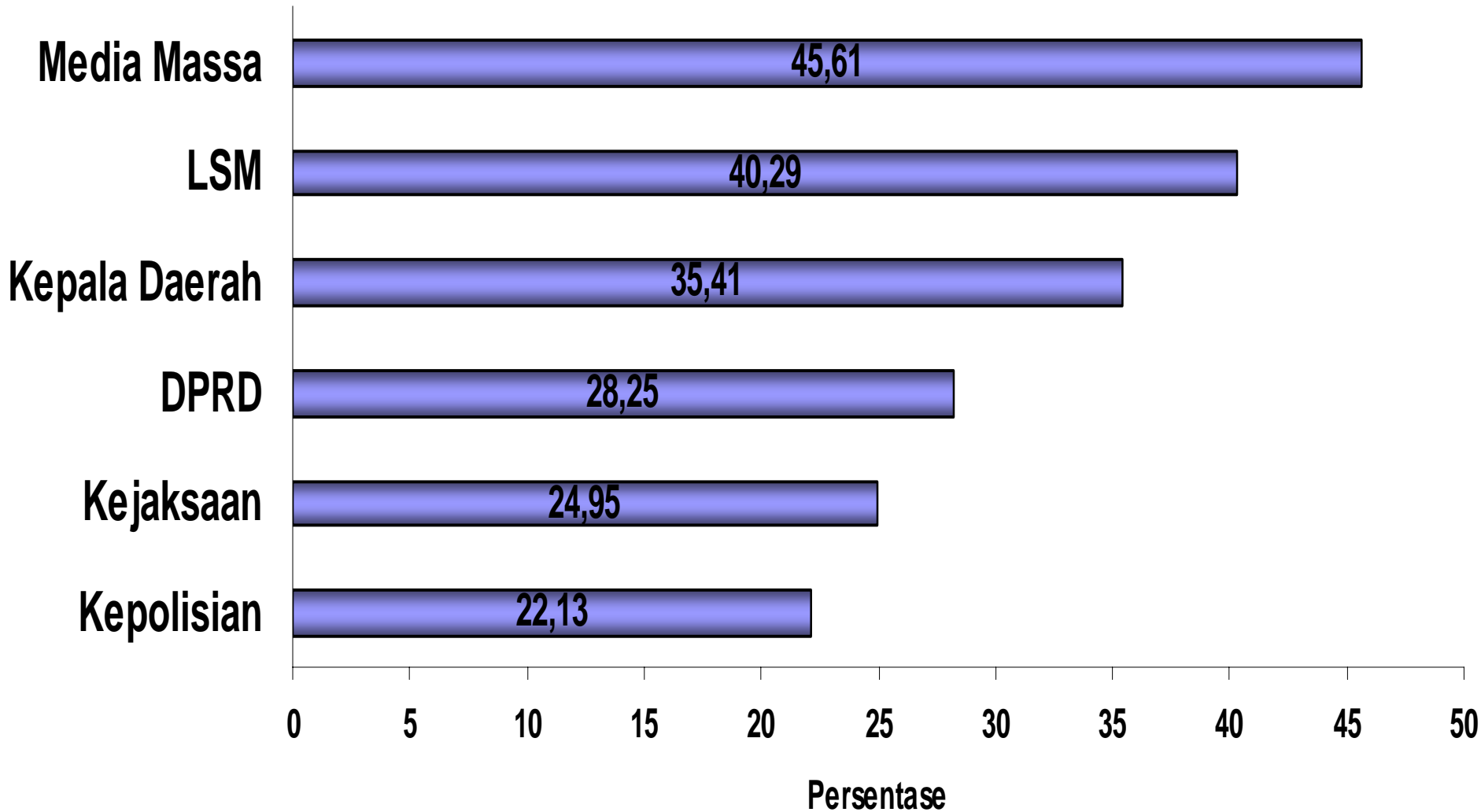
N = 1844

Pengendalian Korupsi dan Kepercayaan Publik

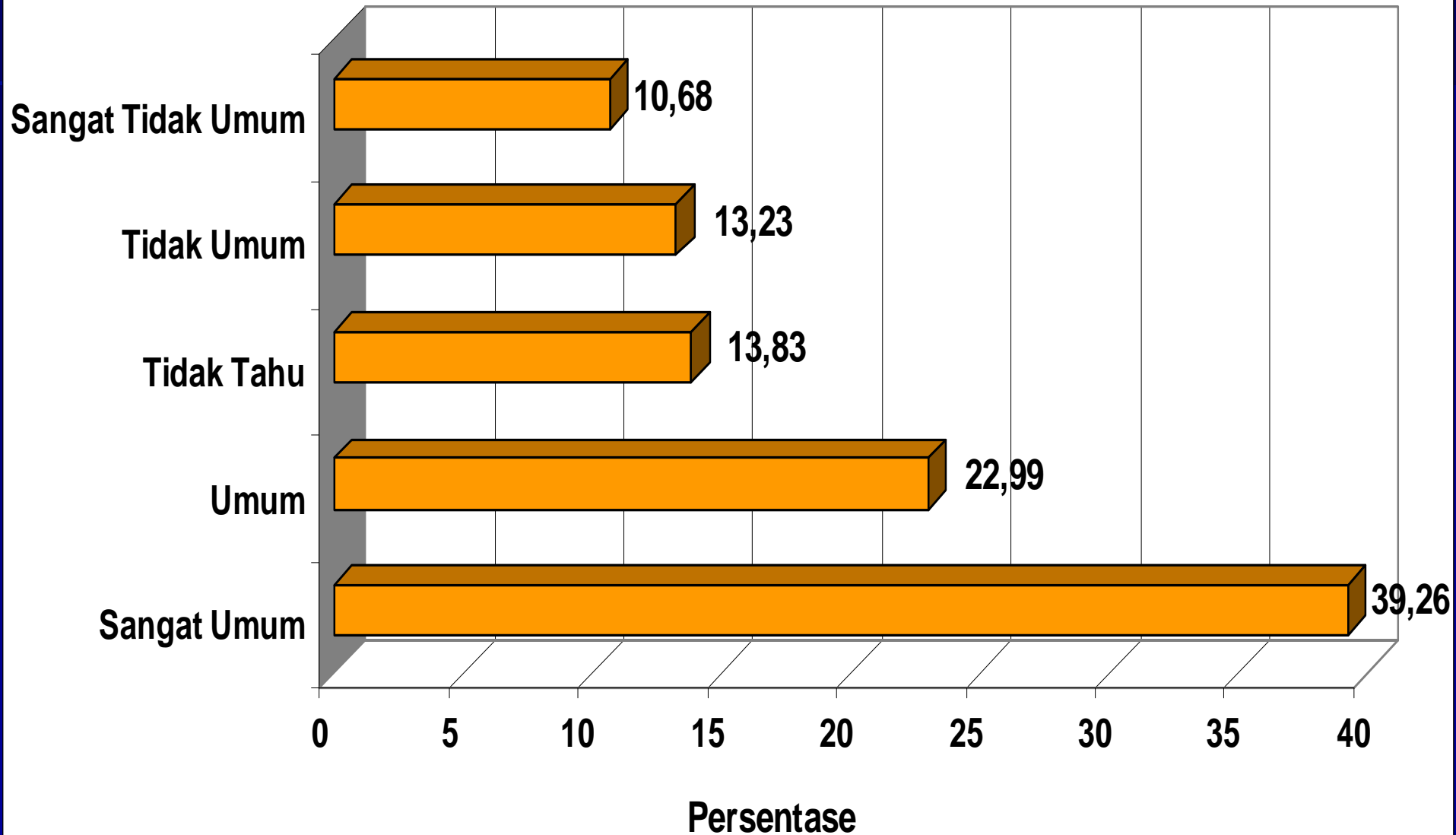
INTENSITAS PEJABAT PEMDA MELAPORKAN KE PIHAK KEPOLISIAN DALAM MENINDAKLANJUTI LAPORAN AUDIT



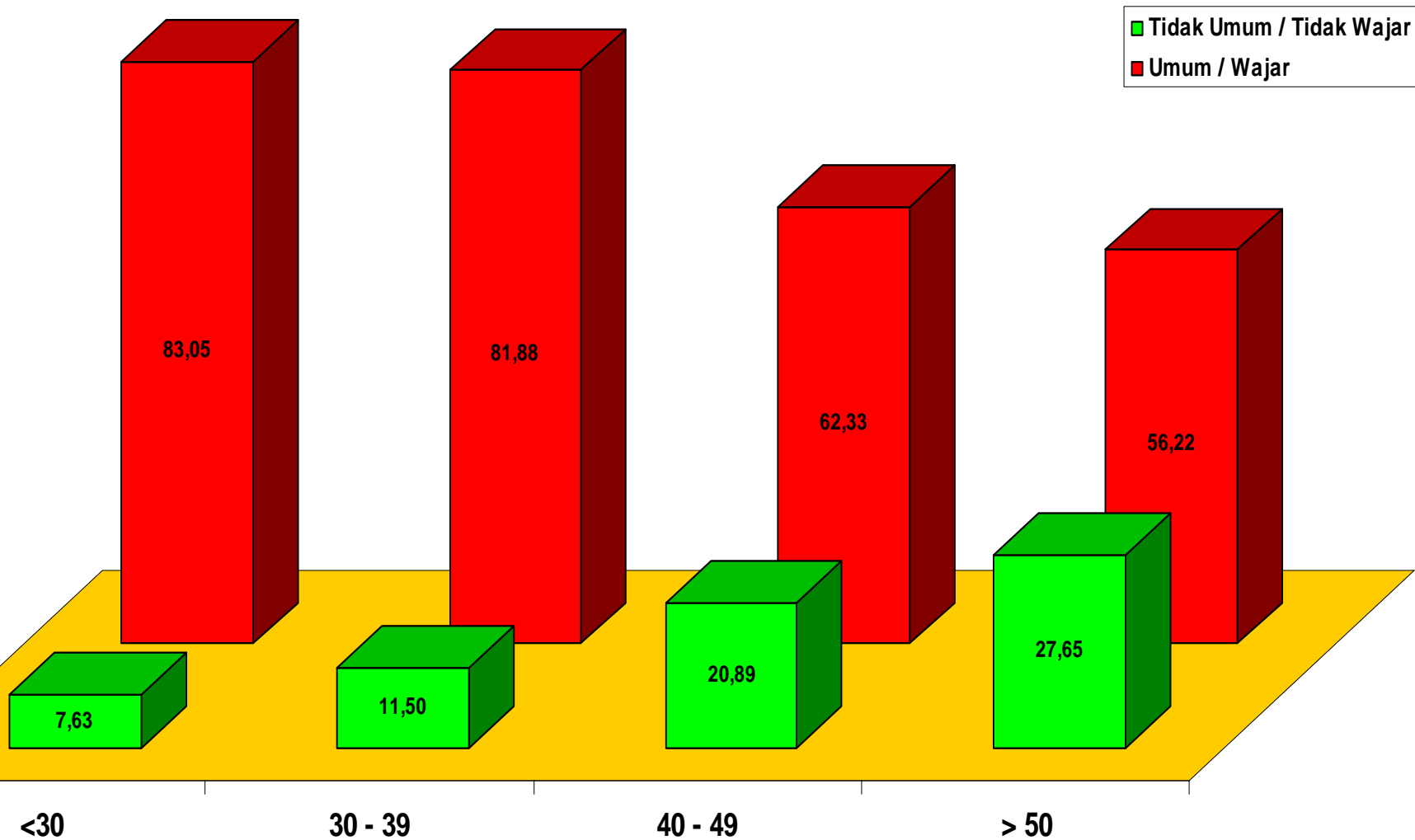
TINGKAT KESERIOUSAN SEJUMLAH LEMBAGA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI



PENILAIAN WARGA MENGENAI PEMBERIAN "UANG EKSTRA" DALAM PELAYANAN PUBLIK

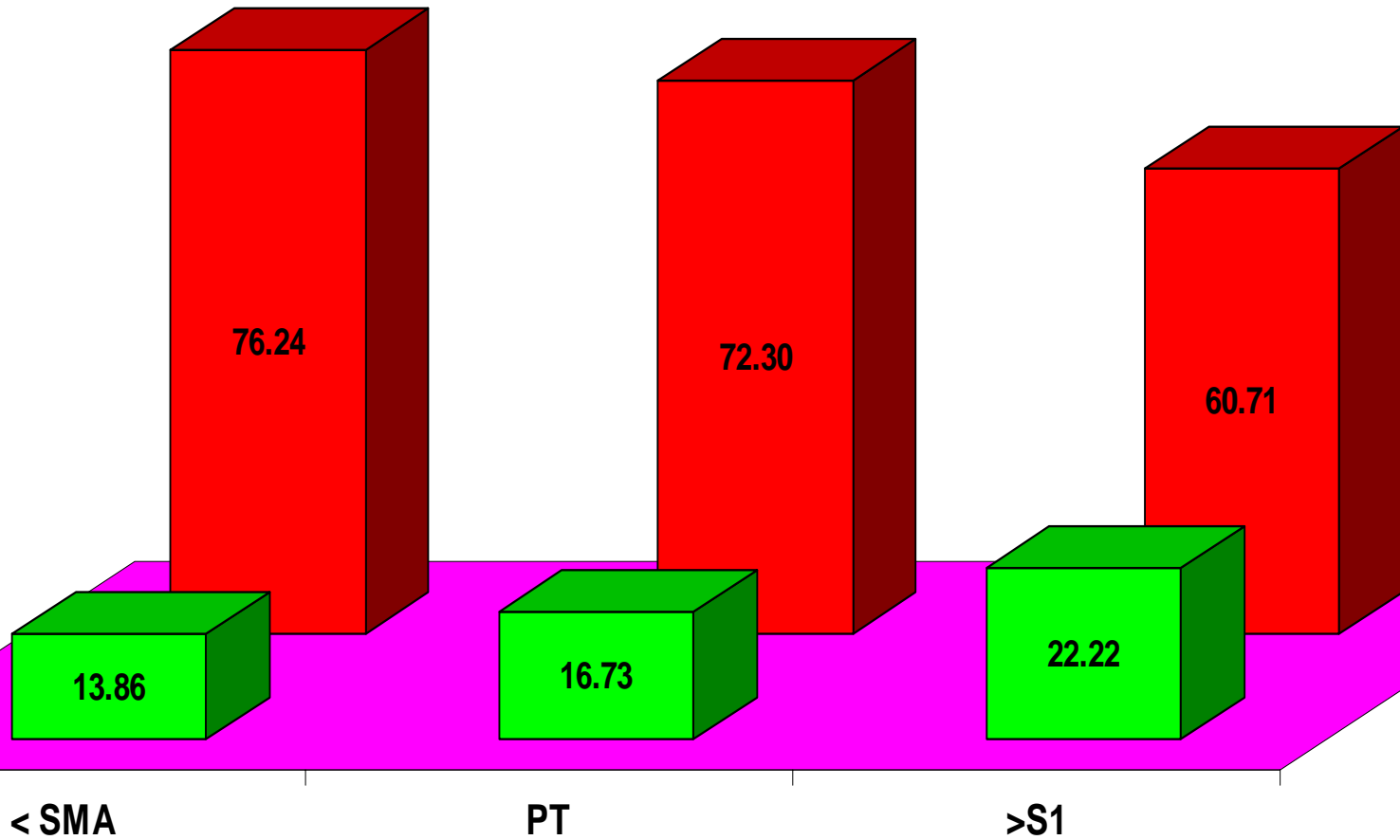


Penilaian Pemangku Kepentingan menurut Kelompok Umur terhadap Praktik Pemberian 'Uang Ekstra' dalam Pelayanan Publik

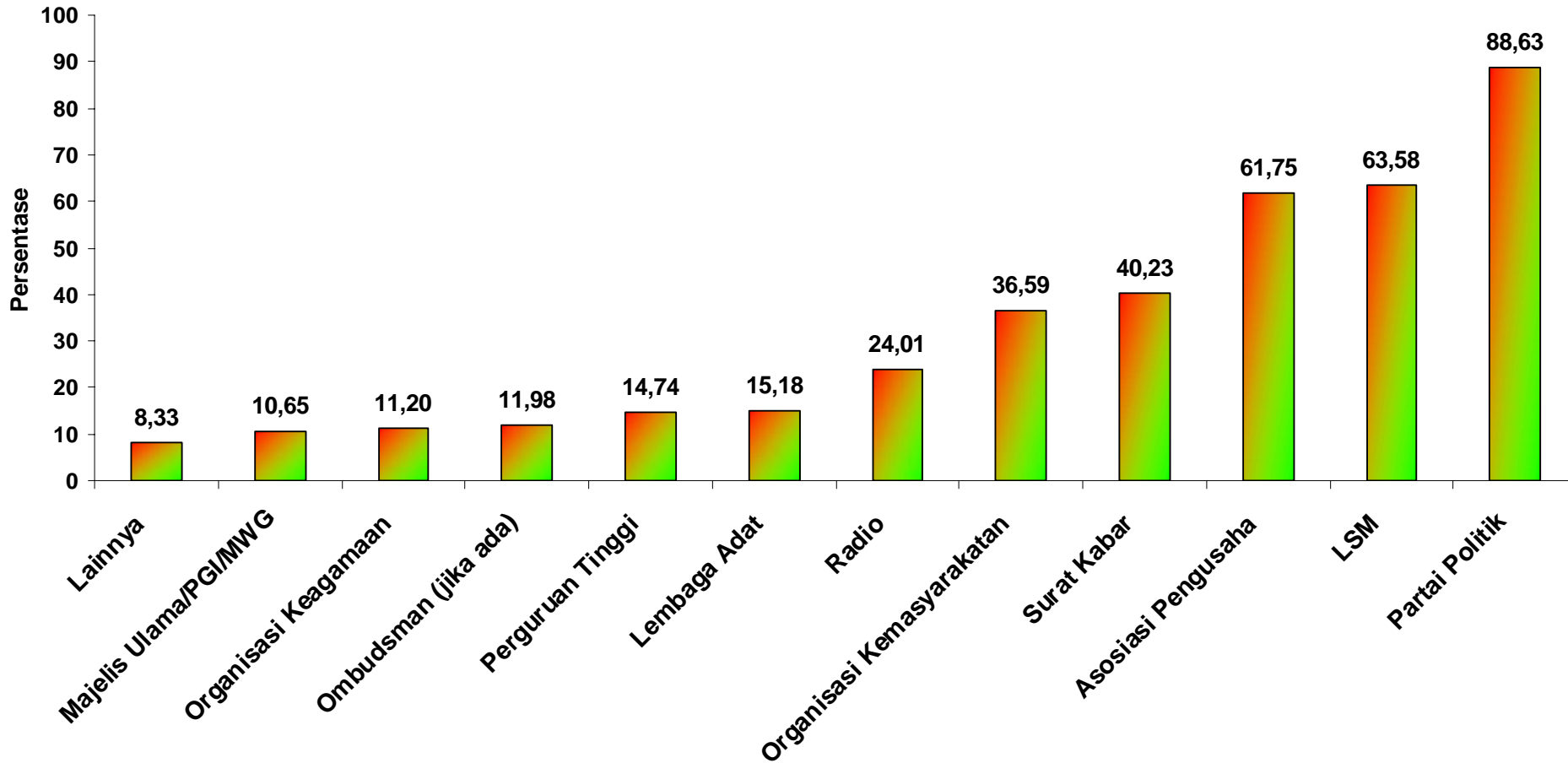


Penilaian Pemangku Kepentingan menurut Tingkat Pendidikan terhadap Praktik Pemberian 'Uang Ekstra' dalam Pelayanan Publik

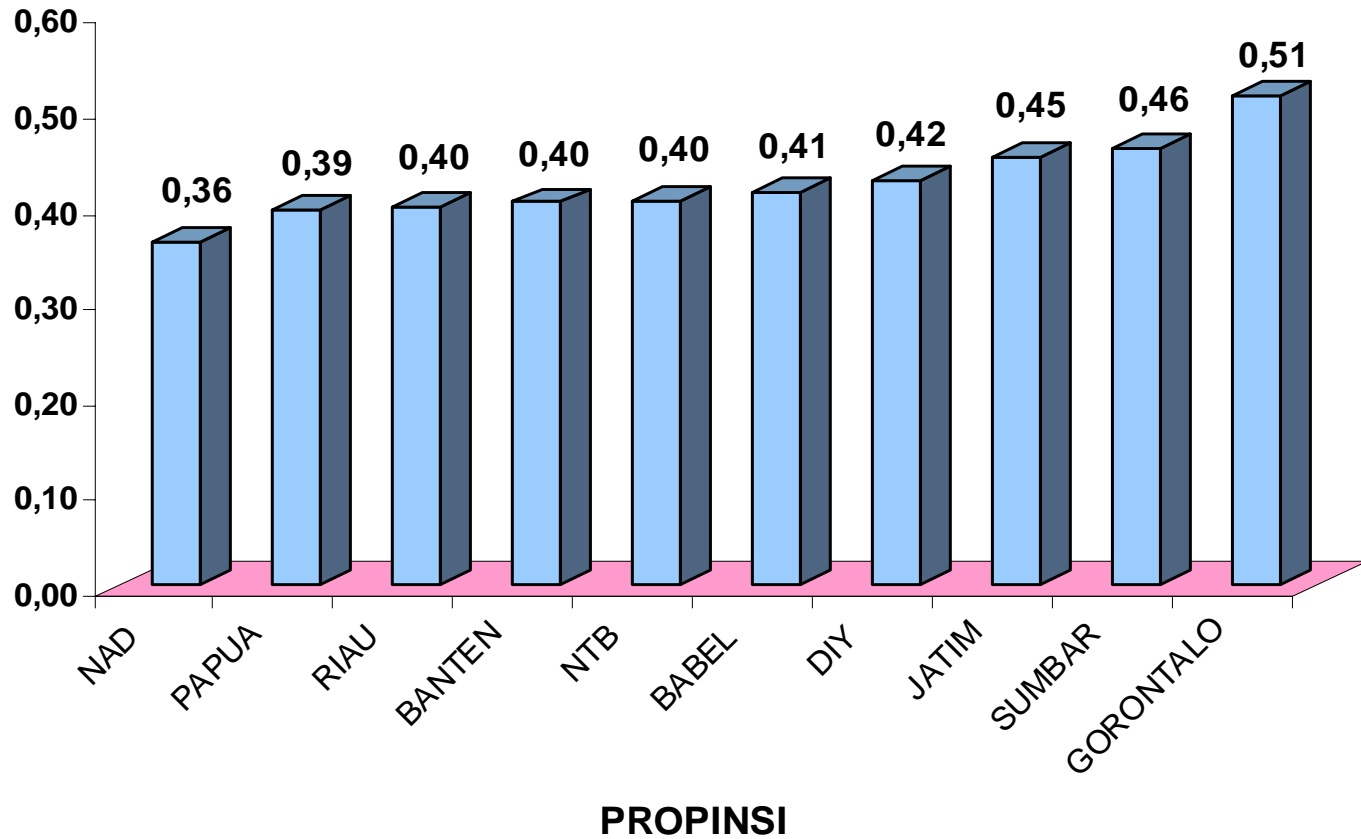
Tidak Umum / Tidak Wajar
Umum / Wajar



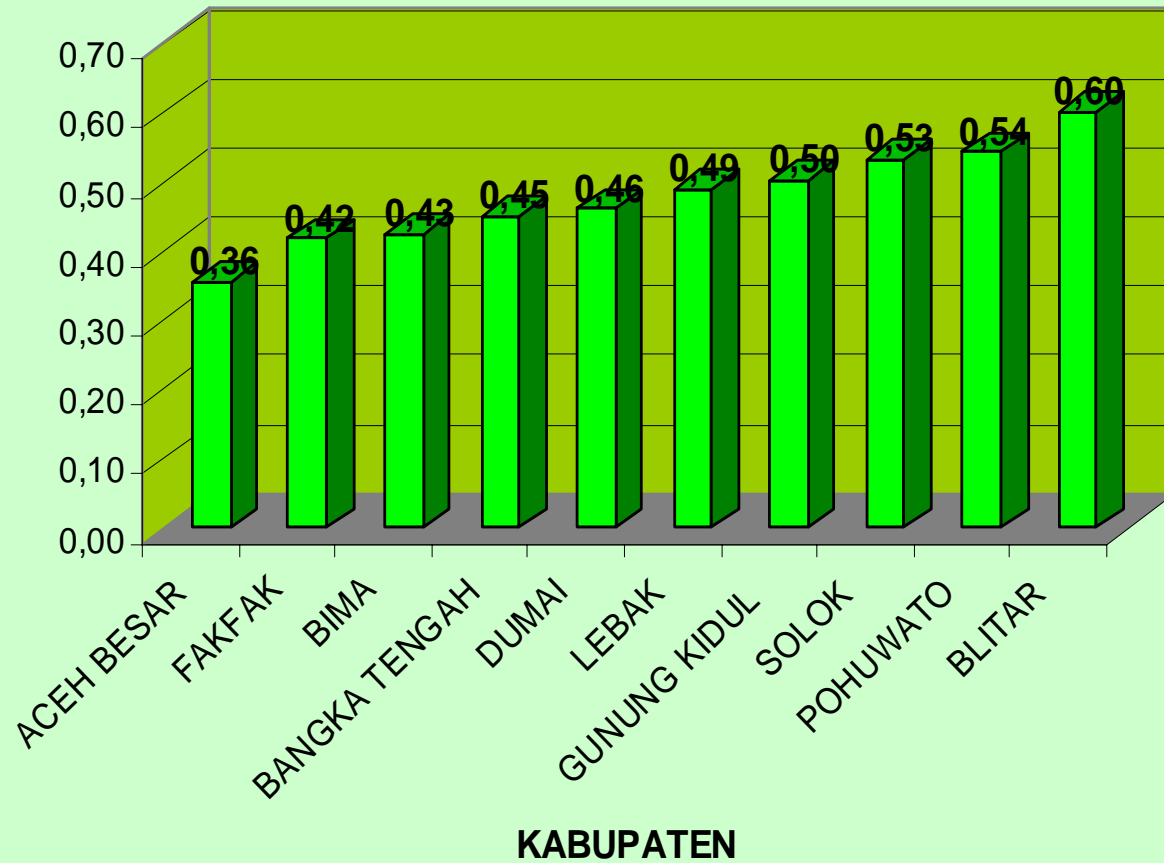
KETIDAKPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA-LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI DAERAH



INDEKS KUALITAS TATA PEMERINTAHAN MENURUT PROPINSI



INDEKS GA KABUPATEN DENGAN TOTAL RESPONDEN



Kesimpulan GAS 2006

- Kendati kemampuan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan publik cukup baik namun mereka masih menghadapi berbagai masalah yang mendasar seperti kemampuan menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan publik, memperbaiki kualitas pelayanan investasi, dan birokrasi yang profesional
- Walaupun perda di daerah dinilai belum mampu memperbaiki investasi dan memberantas KKN, bahkan dinilai menjadi penyebab kegagalan usaha di daerah, tetapi sebagian besar masyarakat menilai perda mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik

Kesimpulan...

- Pemerintah daerah belum mampu menjadikan regulasi sebagai instrumen untuk memperbaiki iklim usaha dan mengendalikan perilaku korupsi. Namun, peraturan daerah dinilai mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik.
- Stabilitas politik di daerah pada umumnya cukup baik. Jenis konflik yang bersumber pada nilai-nilai primordial seperti perbedaan etnis, agama, dan daerah asal memiliki frekwensi yang rendah. Jenis konflik yang memiliki frekwensi yang cukup tinggi umumnya adalah jenis konflik yang menggambarkan dinamika politik yang tinggi, seperti antar rakyat-pejabat publik, antara eksekutif dan legislatif, dan antar pendukung partai.

Kesimpulan

- Penegakkan hukum di daerah masih menghadapi masalah yang persisten, terutama dalam menjamin pemerataan akses terhadap perlindungan hukum, keadilan, dan kejujuran dalam penegakkan hukum. Kegagalan dalam penegakan hukum membuat lembaga-lembaga penegak hukum kehilangan kepercayaan publik.
- Kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan praktik korupsi di daerah dinilai rendah oleh para *stakeholders*. Padahal korupsi dalam birokrasi menjadi penyebab paling kuat dari kegagalan usaha di daerah, disamping kepastian regulasi, dan kepastian hak atas tanah.

Kesimpulan

- Pengendalian korupsi di daerah masih menghadapi banyak kendala karena keseriusan pemerintah dan lembaga non-pemerintah masih rendah. Bahkan, sebagian besar masyarakat menilai pungli sebagai hal yang umum. Ini menunjukkan bahwa budaya antikorupsi belum berkembang di daerah.
- Ada kecenderungan krisis kepercayaan yang meluas, bukan hanya terhadap lembaga pemerintah tetapi juga lembaga-lembaga non pemerintah.

Kesimpulan

- Kendati secara nasional masih ada banyak masalah namun beberapa propinsi dan kabupaten/ kota (Blitar, Solok, Gorontalo, Sumbar, Jatim) menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam penyelenggaraan tata pemerintahan
- Kinerja tata pemerintahan di daerah berbeda-beda tergantung pada beberapa hal: kepemimpinan di daerah, intervensi pihak luar, dan kualitas masyarakat sipil.

Ancaman Tsunami Sosial

- Bencana alam tiada henti-hentinya mendera beberapa daerah
- Kesengsaraan rakyat semakin diperparah oleh bencana alam, baik karena faktor alam mau pun karena ulah manusia (Kasus Lapindo di Siduwardjo) dan banjir di Aceh Tamiang dan Kalimantan Barat.

Ancaman Tsunami Sosial

- NTP (Nilai Tukar Petani) antara 2004 dan 2006 tidak menunjukkan peningkatan, bahkan di beberapa daerah cenderung menurun.
- Sektor pertanian yang merupakan sumber nafkah sebagian terbesar masyarakat Indonesia mengalami kemerosotan produktivitas yang cukup tajam. Padahal pada menghadapi krisis regional tahun 1997-1998, sektor ini yang paling bertahan terhadap gejolak tersebut.

Ancaman Tsunami Sosial

- Kecelakaan KM Senopati, Adam Air dan Batavia Air yang terjadi karena tidak adanya good governance dalam industri perhubungan;
- Penanganan bencana alam timbulkan banyak kekecewaan di masyarakat;
- Pembalakan hutan liar terus terjadi;

Ancaman Tsunami Sosial

- Perusakan lingkungan terus terjadi
- PP No 37/2006

